

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diplomasi budaya merupakan suatu langkah diplomasi yang diterapkan oleh negara-negara untuk mempromosikan kekhasan budaya yang suatu negara miliki (UNESCO, 2022). Diplomasi budaya menekankan aspek keberagaman dalam hubungan antar negara dan membuka jalan untuk terjalinnya kerjasama dan dialog antar negara. Dalam dinamika pergaulan global yang sudah terdampak arus globalisasi, dunia yang saling terkoneksi membuat satu negara dengan yang lainnya terikat dengan interdependensi antar satu sama lain dalam rangka mencukupi kebutuhan perekonomian suatu negara, dan kemudian menjalin hubungan ekonomi maupun dagang dengan negara lain. Kondisi interdependensi tersebut turut mendorong terciptanya kondisi perdamaian dan stabilitas dunia. Kondisi tersebut menciptakan suasana hubungan antar negara secara global dalam memberikan fokus kebijakan nasional terhadap terciptanya kesepahaman, kepercayaan dan paparan terhadap budaya khas dari suatu negara.

Perkembangan diplomasi batik di Indonesia tidak terlepas dari dinamika perubahan haluan kebijakan luar negeri presiden dari masa ke masa, faktor kondisi sosial, politik dan ekonomi domestik pada masa kepemimpinan para presiden turut memengaruhi perkembangan industri batik dan penggunaan batik sebagai sarana diplomasi, fase-fase perubahan kebijakan ekonomi Indonesia pada era Presiden Sukarno (Perang Kemerdekaan, Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin), Presiden Soeharto (Orde Baru) dan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono pada era reformasi turut berdampak terhadap dinamika diplomasi budaya terkait batik, pertumbuhan industri batik lokal dan peranan dari perekonomian batik sendiri.

Kondisi ekonomi Indonesia secara historis mempengaruhi kondisi masyarakat Indonesia, fase perekonomian Indonesia sendiri mencakup berbagai era dan kebijakan, yang meliputi;

a.) Perekonomian Era Perang Kemerdekaan.

Selama masa era Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) fondasi perekonomian Indonesia masih lemah dan rentan terhadap adanya pengaruh gejala konflik bersenjata dan faktor eksternal, hal ini disebabkan oleh fokus pemerintah Indonesia yang mengutamakan perjuangan bersenjata dalam perlawanan terhadap perang kolonial yang dicanangkan oleh Belanda sejak tahun 1945 dalam rangka mengembalikan Indonesia sebagai koloni Hindia-Belanda (Sidharta, 2019). Aspek perkembangan budaya kemudian dialih fokuskan dari menunjukkan kekhasan budaya daerah-daerah di Indonesia ke pengembangan seni budaya revolusioner yang bertujuan untuk memproduksi produk-produk propaganda dalam rangka mendukung upaya kemerdekaan Indonesia dan mengobarkan semangat masyarakat Indonesia dalam menghadapi konflik bersenjata melawan Belanda selama era tersebut.

J. Thomas Lindbald (Linbald, 2013, hal. 8-9), seorang Profesor dari Universitas Leiden menulis bahwa selama era Perang Kemerdekaan, ekonomi nasional difokuskan kepada rehabilitasi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha dan investor dari era kolonial Belanda untuk diambil alih dan dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia untuk memutar modal maupun alat produksi akibat kondisi kesulitan dan kehancuran infrastruktur yang diakibatkan oleh pertempuran-pertempuran, penghancuran objek-objek vital yang dapat digunakan oleh Republik Indonesia untuk menunjang situasi konflik bersenjata melawan Belanda selama terjadinya konflik.

Upaya kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia pada masa ini mayoritas mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak oleh revolusi, bentuk kerja sama ekonomi tersebut seperti; pengiriman gabah, alat kesehatan dan pangan dari India maupun negara-negara lain yang mendukung kedaulatan Indonesia paska deklarasi kemerdekaan (Ministry Of Foreign Affairs of The Republic Of Indonesia, 2019). Kondisi konflik bersenjata tersebut membuat pemerintah Indonesia menganggap bahwa diplomasi budaya untuk membantu perekonomian nasional kurang mempunyai peran yang signifikan pada masa tersebut.

b.) Perekonomian Indonesia Era Demokrasi Liberal.

Pada masa demokrasi liberal, masyarakat Indonesia mengalami euforia paska diakuinya kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada Desember 1949 oleh Belanda, pada masa ini pemerintah Indonesia kesulitan dalam mengelola kas negara diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan dan kebutuhan pemerintah dan masyarakat untuk membangun kembali infrastruktur yang telah hancur akibat perang. Salah satu kebijakan yang merugikan selama masa perang tersebut adalah maraknya uang yang beredar (ORI/Oeang Repoeblik Indonesia, Gulden, dan Yen maupun Sen Jepang) dan diakui sebagai alat transaksi yang sah oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, mengingat kondisi Indonesia saat itu yang sangat mengalami kesulitan ekonomi dan mayoritas masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan akibat konflik (Kastori, 2022).

Sistem parlementer yang diadopsi oleh Indonesia pada masa liberal berdampak terhadap ketidakstabilan ekonomi dan politik, hal ini disebabkan oleh adanya divisi politik di Indonesia antar berbagai ideologi partai politik yang beragam,

sehingga mengakibatkan partai yang berkuasa pada masa itu harus melakukan kompromi politik dengan kebijakan maupun pandangan partai politik lain. Adanya jurang politik yang lebar antara partai politik selama era demokrasi parlementer tersebut melahirkan banyak kebijakan yang bersifat temporer dan tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh sering bergantinya kekuasaan eksekutif di bawah Perdana Menteri yang kerap berganti setelah dilangsungkannya rapat mosi tidak percaya oleh parlemen (Parinduri, 2022). Kebijakan-kebijakan yang lahir pada masa demokrasi liberal mencakup (Kastori, 2022);

- - Kebijakan Ali Baba: merupakan kebijakan yang mengusahakan kerja sama dan kooperasi antara 2 elemen masyarakat, yakni masyarakat pribumi dan masyarakat diluar pribumi (Arab, Tionghoa, India dan masyarakat Indonesia keturunan Belanda). Kebijakan ini mengalami kegagalan dalam implementasinya yang disebabkan oleh aliran dan bantuan modal yang diberikan pemerintah Indonesia digunakan secara lebih efektif oleh masyarakat diluar pribumi, sedangkan bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat pribumi kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan digunakan sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan tersier.
- Kebijakan Gunting Uang: kebijakan ini dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu langkah untuk mengurangi angka inflasi paska Perang Kemerdekaan dan meminimalisir peredaran uang di masyarakat. Implementasi dari kebijakan gunting uang tersebut adalah masyarakat dianjurkan pemerintah agar melakukan transaksi dalam aktivitas sehari-hari menggunakan 2 mata uang, 1 mata uang bernilai sama dengan mata uang lama era Perang Kemerdekaan dan satu mata

uang bernilai sesuai nilai di pasaran sesuai dengan uang edisi terbaru yang di edarkan oleh bank sentral (Bank Indonesia), kebijakan ini berjalan cukup efektif dan berhasil menciptakan kestabilan ekonomi dengan mulai menurunnya angka inflasi yang sudah berjalan cukup tinggi semenjak masa Perang Kemerdekaan, menurunnya angka inflasi kembali ke taraf yang wajar berdampak terhadap mulai berkembangnya perekonomian Indonesia memasuki tahun 1952-1953.

Masa demokrasi Liberal di Indonesia meskipun memiliki indikator-indikator ekonomi maupun perkembangan sosial yang relatif lambat, namun era ini berhasil menghasilkan periode pertumbuhan ekonomi pertama di Indonesia, perkembangan ekonomi yang pesat selama tahun 1951-1954 disebabkan oleh terjadinya Perang Korea di semenanjung Korea, yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan membantu perkembangan ekonomi Indonesia, munculnya devisa akibat kenaikan komoditas tersebut digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menstabilkan kondisi fiskal negara yang tidak stabil (Pramisti, 2020). Stabilitasnya perekonomian dan perkembangan sosial masyarakat pada era ini mendukung kemunculan kembali dari munculnya identitas lokal masyarakat, hal ini tercermin dengan maraknya kembali produksi tekstil-tekstil lokal dan bertumbuhnya seni pertunjukkan daerah yang merupakan upaya untuk membangkitkan kembali pariwisata di Indonesia yang mengalami stagnansi pada era Perang Kemerdekaan dengan melakukan program pertunjukkan seni ke luar negeri sebagai sarana diplomasi (Cohen, 2019, hal. 258).

c.) Ekonomi Era Demokrasi Terpimpin

Pada masa ini sentimen nasionalisme pemerintah dan masyarakat Indonesia sedang mengalami euforia, masa ini dimulai secara *de facto* setelah di keluarkannya

maklumat oleh Presiden Sukarno pada tahun 1956 terkait penerapan SOB (*Staat Oorlog van Beleid*) di seluruh wilayah Indonesia akibat terjadinya gelombang gerakan separatis di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan PRRI/PERMESTA dan gerakan pemberontakan Islam DI/TII, kendali politik Presiden Sukarno kemudian semakin kuat setelah di deklarasikannya Dekrit Presiden pada 9 Juli 1959 yang mengembalikan dasar negara Indonesia dari penggunaan UUDS 1950 kembali menjadi UUD 1945 dan semakin memperkuat posisi kekuasaan politik eksekutif yang berada di tangan presiden (Fakih, 2013, hal. 100-101). Meningkatnya tren politik otoritarianisme sejalan dengan terpresinya kebebasan ekonomi yang masyarakat Indonesia rasakan sebelumnya pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini kebebasan berekspresi masyarakat dibungkam demi kepentingan revolusi Indonesia melawan neokolonialisme blok barat pada masa eskalasi konflik Perang Dingin antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet (Benoit, 2017).

Untuk mencapai keberhasilan revolusi melawan kaum neokolonialisme barat, Presiden Sukarno menetapkan konsepsi ideologi NASAKOM (NASIONALIS, AGAMA, KOMUNIS (Angel, 1970, hal. 504-538). Ideologi tersebut menekankan persatuan antara tiga ideologi politik yang kontradiktif satu dengan lainnya, pemerintah Indonesia mengambil sikap konfrontatif kepada negara-negara blok barat selama masa Demokrasi Terpimpin meskipun pada masa demokrasi liberal pemerintah Indonesia dan para pelaku usaha sangat bergantung terhadap suntikan dana dan investasi asing dari negara blok barat, salah satu dampak dari keberpihakan Indonesia ke kubu blok timur menghasilkan perginya dan berkurangnya jumlah investasi asing dari negara-negara barat yang sudah relatif lebih maju seperti; Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman Barat dan digantikan oleh aliran investasi dari Uni Soviet, Republik Rakyat China dan Kuba yang memiliki kapabilitas

ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara blok barat pada saat itu.

Beberapa kebijakan ekonomi dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin melalui kebijakan bersifat nasionalisme revolusioner sehingga tidak memperhatikan secara objektif kebutuhan masyarakat Indonesia di lapangan, masyarakat dituntut untuk berkorban demi berlangsungnya revolusi kiri di Indonesia, beberapa kebijakan tersebut meliputi;

- Nasionalisme Perusahaan Belanda: dalam insiden yang dikenal sebagai insiden Sinterklaas Hitam (*De Zwaarte Sinterklaas*), pemerintah Indonesia memberi maklumat kepada seluruh Warga Negara Belanda dan masyarakat Indo¹ di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia pada tahun 1957 (Kerkhof, 2005, hal. 18). Warga negara Belanda dan masyarakat Indo merupakan penggerak ekonomi utama di Indonesia selama era demokrasi liberal pada awal tahun 1950-an, kolaborasi ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan diaspora Belanda yang tinggal di Indonesia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi pada era melonjaknya devisa dari kenaikan harga komoditas, namun peraturan yang dilakukan oleh pemerintah menghentikan adanya kolaborasi ekonomi antara kedua pihak tersebut, namun akibat terjadinya konflik penyerahan wilayah Papua ke pihak Indonesia mengakibatkan terjadinya eskalasi konflik antar kedua negara. Untuk memberikan tekanan kepada Belanda, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait deportasi warga negara Belanda dan masyarakat Indo dari wilayah Indonesia, selain itu pemerintah

¹ . Masyarakat Indo merupakan masyarakat keturunan Belanda yang sudah melakukan asimilasi budaya dengan budaya Indonesia (The Indo Project, 2023)

Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.

Dikutip dari penjelasan Kerkhof, nilai kapital perusahaan Belanda yang besar mengakibatkan perekonomian Indonesia masih sangat bergantung terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dalam menggerakkan roda perekonomian dan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, proses nasionalisasi perusahaan Belanda tersebut berjalan kurang mulus akibat adanya penyalahgunaan wewenang dari perusahaan nasional yang mengakuisi tersebut. Praktik korupsi yang dilakukan dalam birokrasi perusahaan nasional mengakibatkan macetnya modal, berkurangnya keuntungan dari badan usaha negara yang baru tersebut mengakibatkan stagnansi ekonomi nasional akibat kebijakan pemerintah Indonesia tersebut.

- Mencetak Uang: pemerintahan Indonesia pada era NASAKOM banyak melaksanakan proyek-proyek mercusuar yang bertujuan untuk meningkatkan prestise dan jati diri bangsa Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk membangun mentalitas nasional tersebut pemerintah Indonesia melakukan program pembangunan secara masif seperti pembangunan infrastruktur berskala besar dalam jumlah ukuran dan pembangunan monumen-monumen yang bercorak kultus individu berupa pemujaan terhadap Presiden Sukarno, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada realita (Fakih, 2020, hal. 239-254). Pembangunan infrastruktur secara masif tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia diakibatkan oleh adanya mismanajemen ekonomi untuk kepentingan nasional, seperti

pembelian alusista untuk persenjataan ABRI secara masif dari Uni Soviet untuk kepentingan Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) melawan Belanda untuk mengembalikan teritori kolonial Belanda di Papua kembali menjadi milik Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian melaksanakan Operasi Dwikora atau disebut sebagai Konfrontasi dengan Malaysia dan Inggris dari tahun 1963-1965, konflik militer tersebut merupakan ambisi teitori Presiden Sukarno untuk menghambat berdirinya negara Malaysia (Sholehuddin, 2015, hal. 74-80).

Proyek-proyek mercusuar yang didirikan pada era NASAKOM seperti pembangunan Monumen Nasional (MONAS), pembangunan Stadium Gelora Bung Karno, proyek pembangunan jalan protokol di sekitar Jakarta, pembangunan Hotel Indonesia, pembangunan Wisma Nusantara, dan pembangunan monumen-monumen bercorak sosialis yang mempunyai nilai ekonomis yang minim pada saat itu tidak dapat menambah isi kas negara yang sudah mengalami pengeluaran sangat masif.

Penggunaan APBN secara tidak efisien tersebut dan pengunaan APBN sebagai sarana untuk mendukung konflik Indonesia dengan berbagai negara saat itu, mengakibatkan berkurangnya pemasukan devisa Indonesia akibat memburuknya perpolitikan internasional Indonesia dengan berbagai negara mengakibatkan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia memasuki dekade 1960-an, hal ini tercermin dari meningkatnya angka kemiskinan masyarakat Indonesia, sekitar setengah penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 1964.

Kondisi perekonomian nasional yang merosot pada saat itu semakin memburuk dengan kebijakan pemerintah Indonesia dengan mencetak mata

uang secara berlebihan untuk menunjang program-program Presiden Sukarno, maraknya peredaran mata uang pada saat itu berperan terhadap meningkatnya harga bahan pokok diakibatkan oleh merosotnya nilai Rupiah, kondisi ini diperburuk dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk memotong nilai mata uang (Sanering) dari Rp. 1000 menjadi Rp. 1 (Fakih, 2020, hal. 247-249). Miskalkulasi pemerintah Indonesia dan bank sentral atas kebijakan fiskal ini terletak pada masih buruknya taraf hidup masyarakat Indonesia sehingga masyarakat semakin tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Kebijakan lain yang turut berperan terhadap merosotnya ekonomi Indonesia pada era NASAKOM seperti; kebijakan *land reform*, menolak bantuan lembaga internasional ketika terjadi krisis pangan mengakibatkan inflasi tahunan Indonesia naik ke angka 1000%, pemerintah Indonesia pada saat itu tidak mampu melakukan hal apapun yang efektif dalam mengatasi situasi politik yang pelik hal ini dikibatkan adanya pertentangan antar lembaga pemerintahan terutama adanya hubungan konfliktual antara kekuasaan eksekutif (Presiden Sukarno) dan PKI dengan ABRI (terutama TNI AD) dan masyarakat konservatif lainnya di Indonesia (Aryani, 2021). Adanya pertentangan tersebut dan terjadinya peristiwa G30S mengakibatkan runtuhnya rezim NASAKOM dan naiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden ke-2 Indonesia.

C). Ekonomi Era Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto merupakan sebuah pemerintahan dengan sistem politik sentralistik, setelah kekacauan fiskal dan krisis ekonomi yang telah menjalar menjadi krisis multidimensi fokus pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru adalah kestabilan fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam

rangka menjadikan Indonesia lepas dari predikat negara miskin dan meningkatkan perekonomian menjadi negara kelas menengah.

Sejak dimulainya rezim Orde Baru terjadi perubahan orientasi politik Indonesia yang sebelumnya condong ke Blok Timur menjadi condong ke Blok Barat (Indonesia Investments, 2023). Pada masa awal-awal Orde Baru berbagai pihak yang membantu bergantinya pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru mendapat kursi di parlemen, elemen-elemen seperti teknokrat, ABRI dan mahasiswa mengisi kursi parlemen pada masa ini. Terjadi masa keterbukaan politik dan individu secara singkat pasca terjadinya rezim otokratik di bawah Sukarno, karena dianggap tidak memiliki pengaruh politik yang sekuat Sukarno, maka Soeharto pada masa awal kepemimpinannya melakukan beberapa pembagian kekuasaan kepada pimpinan militer yang telah membantu dia naik ke kekuasaan. Pada tahun 1968 Soeharto ditetapkan sebagai presiden ke-2 Republik Indonesia, disaat ini ia mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya seperti perubahan sistem komando militer, dihapusnya juga jabatan menteri angkatan bersenjata, dengan diterapkannya peraturan baru ini dianggap juga berkurangnya ancaman politis dari pihak militer. Pemerintahan Orde Baru berusaha memperbaiki kondisi perekonomian yang telah mengalami pelemahan dan kontraksi perekonomian semenjak berakhirnya kekuasaan Sukarno yang diakibatkan mismanajemen ekonomi dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih rasional tujuan dari kebijakan tersebut untuk meningkatkan investasi di Indonesia agar kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran, Presiden Soeharto menunjuk beberapa teknokrat ekonom yang nantinya dijuluki sebagai Mafia Berkeley.

Para teknokrat tersebut merancang garis haluan ekonomi Indonesia dengan melakukan liberalisasi ekonomi Indonesia, melalui serangkaian UU yang disahkan

pada tahun 1967, Indonesia mulai membuka diri terhadap investasi asing maupun bantuan asing, pembukaan pintu ekonomi ini dimulai dari sektor perbankan, migas, perhutanan yang pada nantinya pintu investasi semakin dibuka lebar pada dekade-dekade berikutnya. Dengan dibukanya kesempatan terhadap investasi asing tersebut, bantuan modal dari negara blok barat seperti Amerika Serikat dan Jerman Barat mulai masuk ke Indonesia, mulai masuknya modal asing tersebut digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menstabilkan kondisi fiskal dan kas negara, dengan harapan setelah terciptanya kestabilan ekonomi, pemerintah Indonesia dapat memberikan fokus terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Upaya pemerintah Orde Baru dalam melakukan pembangunan di implemmentasikan melalui kebijakan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), program-program REPELITA disusun oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan fokus pembangunan yang berbeda-beda per lima tahun sesuai dengan situasi ekonomi Indonesia pada saat itu. Tujuan utama dari REPELITA adalah melakukan transformasi ekonomi nasional melalui serangkaian kebijakan bertahap agar Indonesia mampu menjadi negara yang terindustrialisasi dan siap bersaing secara ekonomi di pasar global melalui pembangunan hubungan diplomatik yang mengutamakan kerja sama dengan berbagai negara di dunia (Rahmawati, 2022, hal. 38-41). REPELITA terdiri atas tujuh program pembangunan yang berlangsung hingga tahun 1998, yang berakhir ketika rezim Orde Baru runtuh, yang meliputi;

- REPELITA I (1969-1974): program pada REPELITA I memberikan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang telah mengalami penurunan kapasitas produksi pada era Demokrasi Terpimpin. Pembangunan infrastruktur dasar tersebut bertujuan

untuk mendorong kembali ekonomi agrikultur Indonesia, mengingat pada masa REPELITA I mayoritas masyarakat berkerja dalam bidang pertanian dan kegiatan agrikultural lainnya. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan nasional dan pabrik juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, hal ini diakibatkan oleh mininya tingkat konsumsi Indonesia pada akhir masa Demokrasi Terpimpin akibat terjadinya krisis fiskal (VOI, 2022). REPELITA I sukses dalam menciptakan kestabilan fiksial negara dan pemerintah kemudian dapat memfokuskan kebijakan mereka terhadap diversifikasi sektor ekonomi untuk melakukan pembangunan nasional.

- REPELITA II (1974-1979): Program REPELITA II bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi di pulau-pulau luar Jawa hal ini dilakukan melalui program transmigrasi dengan mengirim masyarakat Jawa ke pulau-pulau yang kondisi pembangunan ekonominya masih relatif minim. Kondisi perekonomian Indonesia pada era ini terbantu oleh adanya kenaikan harga minyak secara drastis yang diakibatkan oleh terjadinya Perang Yom Kippur di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia berhasil memaksimalkan ekspor minyak Indonesia akibat terjadinya embargo minyak yang dilakukan anggota OPEC yang mayoritas berasal dari Timur Tengah (McCawley, 2013, hal. 273-274). Pemasukan devisa Indonesia mengalami peningkatan secara besar-besaran akibat keuntungan hasil ekspor minyak, selain itu pertumbuhan GDP

Indonesia meningkat secara pesat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun dari 1974-1981.

Pertumbuhan ekonomi tersebut digunakan pemerintah Indonesia untuk menaikkan standar hidup masyarakat Indonesia dengan melakukan perluasan lapangan kerja, membangun sarana dan prasarana pendidikan, melakukan elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia, memperbaiki kondisi infrastruktur desa melalui program AMD (ABRI Masuk Desa) (Rahmawati, 2022, hal. 39-40). Peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia pada REPELITA II terlihat dari meningkatnya budaya konsumsi di Indonesia dan masyarakat sudah mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Pembangunan pada era REPELITA II mengalami polemik dengan mulai meluasnya praktik korupsi di kalangan pejabat, praktik korupsi tersebut tercermin atas terjadinya skandal Pertamina yang terjadi pada tahun 1976, buruknya pengelolaan keuangan Pertamina pada saat itu dengan membuat program yang tidak efektif seperti membuat restoran di New York yang tidak dapat menghasilkan keuntungan besar dan pengambilan hasil keuntungan migas Pertamina oleh para pejabat tinggi perusahaan tersebut mengakibatkan pemerintah harus melakukan intervensi untuk mencegah kebangkrutan Pertamina, mengingat Pertamina merupakan sumber pemasukan devisa negara paling besar pada pertengahan 1970-an (McCawley, 2013, hal. 374-375). Skandal Pertamina tersebut mengakibatkan pemerintah lebih berhati-hati

dalam mengelola keuangan negara. Masalah dari skandal Pertamina tersebut kemudian bertambah dengan jatuhnya harga minyak setelah Revolusi Iran, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 1979-1981, namun pemerintah Indonesia menganggap bawah ketergantungan pemasukan negara dari sektor migas harus mulai dikurangi.

- REPELITA III (1979-1984): Pembangunan dasar industri padat karya dan manufaktur menjadi fokus pemerintah Indonesia pada masa REPELITA III. Adanya penambahan fokus sektor ekonomi Indonesia didasari oleh terjadinya krisis Pertamina pada tahun 1976, mismanajemen keuangan Pertamina mengakibatkan Pertamina nyaris bangkrut. Ketidcakapan birokrasi negara dan birokrasi yang korup mengakibatkan hasil devisa dari *oil boom* tersebut kurang dapat dimaksimalkan dengan baik untuk terlaksananya pembangunan. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa REPELITA III bertumbuh secara kurang baik, pertumbuhan tahunan Indonesia pada era ini hanya sekitar 4.6%, inflasi Indonesia mengalami peningkatan sekitar 8-11% per tahun. Stagnansi ekonomi yang dialami Indonesia disebabkan oleh terjadinya *oil glut* setelah adanya keputusan dari Arab Saudi untuk menurunkan harga minyak untuk meningkatkan jumlah ekspor (Arndt, 1988, hal. 111-113). Dampak *oil glut* di Indonesia mengakibatkan peningkatan kemiskinan di Indonesia dan pelemahan mata uang Rupiah, beberapa hasil keuntungan devisa dari *oil boom* pada masa REPELITA II harus digunakan untuk

membrikan suntikan kepada Rupiah yang sedang lemah agar tetap terjaga nilai mata uang Rupiah, pada masa ini nilai Rupiah mengalami pelemahan dari Rp. 480 ke Rp. 1100 akibat tidak mampu menahan tekanan dari dollar akibat menurunnya nilai ekspor migas.

Untuk mengatasi pelemahan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mulai melakukan diversifikasi sektor ekonomi untuk dapat kembali menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan menyuntik modal kepada pengusaha dan relaksasi regulasi agar ekonomi swasta dapat berkembang, pada tahun 1983 pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi sistem perbankan nasional dengan menghapus pembatasan kredit, mengurangi kategori kredit yang dapat di likuidasi apabila terjadi masalah keuangan terkait keuangan atau kebangkrutan bank, menghapus dan menekankan independensi bank sentral dari kendali pemerintah, terutama dalam pengendalian deposito dan jumlah pinjaman dan mengakhiri subsidi fiskal pemerintah terhadap deposito bank sentral (Pangestu, 2002, hal. 4-5). Setelah diberlakukannya kebijakan reformasi perbankan pada tahun 1983 kenaikan suku bunga memiliki indikator yang positif dan kenaikan devisa negara meningkat pesat terlihat dari kenaikan rasio M2 (Kas, cek, deposit, giro) sebesar 18% dari tahun 1982 menjadi 30% pada tahun 1988 yang mencakup dari keseluruhan PDB Indonesia.

REPELITA III kurang mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dan mengurangi kemiskinan di masyarakat, meskipun kualitas hidup masyarakat tetap meningkat pada masa REPELITA III, namun kenaikan harga bahan baku pada masa ini mengakibatkan naiknya angka kriminalitas dan perubahan pola perilaku masyarakat dalam mengatasi perlambatan ekonomi akibat *oil glut*.

- REPELITA IV (1984-1989): Setelah terdampak oleh *oil glut*, pemerintah Indonesia berupaya untuk memfokuskan REPELITA IV dalam penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi peningkatan kemiskinan di masyarakat pada awal dekade 1980-an dan membangun pertumbuhan ekonomi di sektor industri yang sudah dimulai di REPELITA III. Dilansir dari *website* KataData menyatakan bahwa dampak dari *oil glut* berperan signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan terkurasnya devisa, untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 1986, Bank Indonesia melakukan devaluasi nilai rupiah terhadap dollar dari Rp. 1100 menjadi Rp. 1500 untuk meningkatkan nilai ekspor non-migas (Laily, 2022) selain program tersebut, pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa deregulasi perbankan yang sudah dimulai sejak tahun 1985 dengan mempermudah izin pendirian bank swasta, kebijakan ini kemudian di permudah dengan dikeluarkannya kebijakan PAKTO 88 yang meliputi peraturan terkait (Pangestu, 2002, hal. 5); a.) Kemudahan izin pendirian dengan melakukan sistem *joint venture* dengan modal minimum 50

Miliar Rupiah ² dan pembagian kepemilikan asing maksimal 85% dan kemudahan pendirian bank lokal dengan jumlah modal minimum Rp. 10 Miliar³, kemudian bank yang mempunyai kebijakan dan laporan keuangan yang sehat diperbolehkan melakukan transaksi mata uang asing. b). Peraturan terkait pendirian kantor cabang dipermudah, bank asing diizinkan untuk mendirikan kantor cabang di 6 kota besar Indonesia (pada peraturan sebelumnya bank asing hanya diizinkan membuka 2 kantor cabang di Jakarta). c). Pemerintah menentukan bahwa 50% dari pinjaman bank asing harus meliputi bisnis ekspor impor dan 20% pinjaman harus diberikan kepada perusahaan kecil dan menengah. d). BUMN tidak diwajibkan lagi dalam membuat rekening simpanan di bank milik pemerintah dan diizinkan untuk membuka rekening perusahaan di bank swasta. e). Jumlah cadangan minimum bank dikurangi dari sebesar 15% jumlah uanggiro dan 10% dari jumlah tabungan nasabah hanya menjadi 2% dari keseluruhan aset liabilitas. f). Batas pinjaman resmi yang ditetapkan pemerintah untuk pinjaman kepada peminjam tunggal dan kelompok peminjam. Pada bulan Maret 1989 modal bank ditetapkan dan ditetapkan bahwa bank tidak boleh berinvestasi dalam saham. Pemerintah memberi insentif sebagai pengganti larangan investasi tersebut dengan pinjaman luar negeri diganti dengan pemberian 25 persen ekuitas terhadap bank asing tersebut.

² Kurs dollar tahun 1988

³ Kurs dollar tahun 1988

g). Bank diizinkan untuk menerbitkan surat saham, pembebasan pajak diberikan untuk deposito berjangka.

Pendirian bank swasta semenjak diberlakukannya PAKTO 88 meningkat tajam, aliran dana dari sektor finansial meningkat secara pesat, peningkatan tersebut terlihat dari banyaknya pendirian bank swasta baru dari yang sebelumnya berjumlah 101 menjadi 182 setelah diberalkukannya deregulasi.

Setelah pemerintah melakukan kampanye untuk mendorong masyarakat agar gemar menabung di bank, tingginya bunga bank membuat masyarakat tertarik untuk menabung di bank, akibat adanya antusiasme masyarakat terhadap perkembangan dan deregulasi perbankan sektor finansial menjadi salah satu tumpuan utama pemerintah Indonesia dalam mendapatkan pemasukan dan pertumbuhan ekonomi, data perekonomian Indonesia mengalami perbaikan setelah adanya deregulasi PAKTO 88 , pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat menjadi 7% pada tahun 1989, nilai tukar dollar dapat terjaga dan kembali stabil setelah mengalami pelemahan bertahun-tahun, kemudian pendapatan per kapita masyarakat Indonesia kembali mengalami peningkatan pada tahun 1989, setelah sejak tahun 1982 hingga tahun 1988 pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mengalami stagnansi dan penurunan secara berkala, REPELITA IV membangun fondasi perekonomian Indonesia modern dengan mengalihkan sumber pendapatan utama migas ke sektor non-migas (McCawley, 2013, hal. 276-285). Pada tahun 1989 penciptaan lapangan kerja sudah

mulai beragam dan indikator kemiskinan mengalami penurunan secara signifikan pada tahun tersebut.

- REPELITA V (1989-1994): Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kembali pertumbuhan Indonesia pada masa REPELITA IV kemudian diupayakan untuk tumbuh lebih tinggi lagi pada era REPELITA V, keberhasilan diversifikasi ekonomi dari sektor migas ke sektor finansial dan meluasnya lapangan pekerjaan mendorong pemerintah untuk memberikan fokus terhadap perkembangan teknologi telekomunikasi dan infrastruktur transportasi dalam rangka persiapan menghadapi milenium baru pada tahun 2000.

Pada masa REPELITA V ekonomi Indonesia sedang berkembang sangat pesat akibat kemajuan sektor perbankan dan didorong oleh kemajuan ekonomi domestik akibat antusiasme masyarakat dalam menabung di bank maupun dalam melakukan pinjaman untuk membuat usaha sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. Dalam kurun waktu sepanjang REPELITA V pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh di angka 7% per tahun, devisa negara meningkat secara signifikan akibat banyaknya masuk investasi asing terutama dalam bidang finansial dan manufaktur, hal ini didukung oleh lahirnya kawasan-kawasan industri baru di berbagai wilayah Indonesia. Perkembangan pesat ekonomi Indonesia tersebut digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan pembangunan infrastruktur transportasi, meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yang lepas

dari garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga masyarakat Indonesia menjadi semakin konsumtif dan angka kepemilikan kendaraan bermotor mengalami peningkatan (Firman, 2002, hal. 229-249). Pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut terlihat dari data penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 1994 sudah mencapai 13%, merupakan suatu penurunan yang drastis, meningkat pada awal masa pemerintahan Orde Baru jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai 50% dari total jumlah penduduk.

Tommy Firman (Firman, 2002, 229-249) kemudian menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia membangun beberapa infrastruktur untuk mendukung kenaikan jumlah kendaraan bermotor, pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, proyek-proyek jalan nasional dan jalan tol baru dibangun di sekitar kota-kota besar Indonesia memasuki dekade 1990an yang meliputi daerah Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar, pemerintah juga melakukan ekspansi dalam bidang telekomunikasi dengan memperluas jaringan TV swasta nasional dan mendirikan dua perusahaan telekomunikasi seluler (Telkomsel dan Indosat) agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia akan komunikasi yang semakin mengakar di masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini tidak di dukung oleh adanya transparansi dan himbauan dari pemerintah kepada

masyarakat untung bersikap rasional dalam menyikapi pertumbuhan dunia perbankan dan *economic boom* yang Indonesia sedang alami (Pangestu, 2002, hal. 7-8). Budaya konsumerisme masyarakat akibat terpengaruh globalisasi mengakibatkan lahirnya budaya konsumtif, masyarakat Indonesia pada masa ini cenderung melakukan belanja berlebih di luar batas kemampuan finansial mereka, bunga bank yang tinggi mengakibatkan masyarakat cenderung menggunakan transaksi kredit secara berlebihan sehingga mengakibatkan peningkatan hutang swasta secara pesat, hal ini tidak di dukung oleh sikap pemerintah yang kredibel dan transparan terhadap data perekonomian Indonesia hal ini dilakukan semata-mata karena pemerintahan Orde Baru menekankan aspek stabilitas nasional agar terjaganya keamanan negara dari tindakan subversif yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

- REPELITA VI (1994-1998): Tujuan utama dari kebijakan REPELITA VI adalah meningkatkan pembangunan iklim untuk investasi asing untuk semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan melakukan ekspansi industri nasional untuk menghadapi arus globalisasi dunia dan bersaing secara pasar baik dalam regional ASEAN maupun bersaing dalam pasar global (Rahmawati, 2022, hal. 41).

REPELITA VI di bagi menjadi dua tahap, tahap pertama merupakan kelanjutan dari *economic boom* yang di dapatkan pada masa REPELITA V yang berjalan selama 1994 hingga 1996 dan tahap kedua ketika Indonesia menghadapi krisis multidimensi yang

berawal dari Krisis Finansial Asia pada tahun 1997 yang kemudian berlanjut menjadi Krisis Moneter dan politik pada tahun 1998 yang mengakibatkan mundurnya Presiden Soeharto dan berakhirnya rezim Orde Baru, akibat hal tersebut REPELITA VI tidak dapat berjalan tuntas.

Pada tahun 1994-1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa REPELITA V berlanjut dalam jumlah 7% per tahun, angka inflasi terus mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun fiskal pada masa sebelumnya dengan inflasi sebesar 6-7%, cadangan devisa Indonesia terus mengalami peningkatan, data perekonomian yang baik tersebut membuat Pendapatan Per Kapita Indonesia naik menjadi \$ 1060 per tahun pada tahun 1996 dan berhasil menaikkan status ekonomi Indonesia yang sebelumnya dikategorikan sebagai negara *low income* menjadi negara *lower middle income*, kenaikan Pendapatan Per Kapita masyarakat Indonesia terlihat dari semakin menurunnya angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 1996 yang sudah mencapai 10% dari total jumlah populasi Indonesia (Aditiya, 2023). Perkembangan industri perbankan dan industri IPTEK semakin pesat dengan banyak bank yang membuka cabang *overseas* dan dalam bidang IPTEK Indonesia berhasil memproduksi pesawat CN untuk keperluan penerbangan sipil (Firman, 2002). Beberapa prestasi yang Indonesia peroleh berhasil menutupi besarnya nilai hutang swasta dari bank swasta nasional yang semakin membesar akibat

banyaknya perusahaan nasional yang meminjam dalam dollar Amerika Serikat kepada bank swasta.

Sebelum terdampak oleh Krisis Finansial Asia pada tahun 1997, data perekonomian Indonesia pada tahun 1996 hingga pada kuartal awal tahun 1997 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia dalam kondisi sehat, pada laporan keuangan yang dirilis pada tahun 1996 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus, nilai dollar juga stabil dengan tingkat fluktuasi kurs dari tahun 1992 hingga awal tahun 1997 berkisar antara Rp. 2000-Rp. 2300 per USD dan juga pertumbuhan pada tahun 1995 hingga 1996 yang mencapai 8%, namun sistem mata uang yang diterapkan oleh Indonesia saat itu menggunakan sistem *managed float* sehingga nilai kurs dollar dipatok pada nilai dalam kurs Rupiah (Iriana, 2002, hal. 146-150). Sistem yang digunakan oleh bank sentral tersebut tidak mencerminkan nilai aslinya, dari data perekonomian yang dirilis pada 1997 tersebut World Bank memberikan pujian kepada Indonesia dan dijuluki sebagai “the next Asian Tiger” pernyataan tersebut dikeluarkan pada tahun 1997 beberapa bulan sebelum terjadinya krisis yang menimpa Indonesia.

Namun data yang dirilis oleh World Bank pada tahun 1996 tidak mencerminkan kondisi realita perekonomian di lapangan, fondasi perekonomian Indonesia sangat rapuh akibat adanya praktik-praktik ilegal seperti korupsi yang terjadi dalam skala besar dalam lingkungan pemerintahan maupun dalam bisnis. Menurut Ross H. McLeod (McLeod, 2000, hal. 100-109),

kronisme yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru untuk memelihara stabilitas rezim marak terjadi dalam lapisan masyarakat Indonesia dengan adanya proyek monopoli yang dikuasai oleh keluarga Presiden Soeharto sendiri, seperti monopoli cengkeh dan monopoli mobil nasional Timor, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia saat itu sangat menguntungkan pihak penguas. Sistem perbankan berjalan dengan buruk, seperti maraknya praktik peminjaman dollar as dalam jumlah yang besar dan tidak adanya peraturan finansial yang ketat soal jatuh tempo hutang.

Krisis yang bermula dari Thailand pada akhir tahun 1986 mulai masuk ke Indonesia pada bulan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar mulai melemah dari 2300 per USD menjadi 2700 Per USD setelah diserang oleh para spekulan, Bank Indonesia berupaya menjaga nilai tukar rupiah dengan melakukan intervensi, namun upaya tersebut gagal untuk menjaga nilai tukar Rupiah besarnya jumlah utang swasta Indonesia sehingga Rupiah terus mengalami pelemahan hingga mencapai Rp. 3900 pada bulan Oktober (Abubakar, 2018, hal. 2-13). Akibat semakin memburuknya kondisi perekonomian Indonesia pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF untuk menyelesaikan pelemahan ekonomi nasional.

IMF menetapkan beberapa prasyarat untuk menstabilkan, hal yang harus ditempuh Indonesia adalah melakukan reformasi perbankan, penghapusan monopoli, penghapusan subsidi pangan

dan energi dan menyarankan Bank Indonesia untuk meningkatkan suku bunga,. Pada bulan November 1997 pemerintah mulai melakukan likuidasi kepada bank yang memiliki data keuangan yang tidak sehat, setelah melakukan likuidasi dari bank-bank bermasalah IMF kemudian bersedia untuk memberikan paket bantuan bailout ekonomi IMF sebesar USD \$43 Milyar dan untuk sementara waktu nilai Rupiah bisa terjaga.

Sikap pemerintah yang tidak konsekuen menjalankan paket yang diberikan IMF menyebabkan bantuan finansial yang diberikan IMF kepada Indonesia belum dapat memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia (Abubakar, 2018, hal. 11-12). Memasuki tahun 1998 keadaan perekonomian Indonesia dalam kondisi yang buruk, hal ini sudah mulai terlihat ketika masa penutupan kalender fiskal pada bulan Desember 1997 nilai tukar rupiah berada di level Rp. 5000 per USD terus mengalami depresiasi nilai mata tukar hingga Rp. 16000 per USD pada Januari 1998 dan mengakibatkan *panic buying* di masyarakat maupun adanya peningkatan ketidakpercayaan pada pasar dari para pelaku ekonomi.

Keengganan pemerintah dalam menjalankan paket IMF seperti penghapusan monopoli dan tidak konsekuennya proses likuidasi perbankan karena para pemilik bank yang bermasalah tersebut banyak yang diantaranya adalah kroni maupun keluarga dari pihak penguasa sendiri mengakibatkan memburuknya kondisi politik di Indonesia memasuki tahun 1998, sehingga pada awal 1998

pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF kembali, karena bantuan yang sebelumnya tidak cukup untuk memulihkan perekonomian Indonesia, perekonomian saat itu cenderung semakin buruk. IMF dan pemerintah Indonesia lalu menyepakati sebuah Letter of Intent (LOI) pada 15 Januari 1998, kebijakan tersebut berisi seperti pencabutan monopoli Bulog, Privatisasi perusahaan pemerintah dan juga penghapusan retribusi (International Monetary Fund, 1998). Dua bulan kemudian IMF menyatakan bahwa turunnya bantuan \$3 milyar ditunda dengan alasan Indonesia belum memenuhi sejumlah persyaratan agar bantuan tersebut turun, seperti misalnya susunan APBN tahun anggaran 1998 yang dinilai IMF tidak realistis dan tidak mencerminkan perekonomian Indonesia yang sebenarnya.

D.) Ekonomi Indonesia Era Reformasi

Pada masa awal reformasi dibawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie kebijakan pemerintah Indonesia memberikan fokus terhadap pemulihan ekonomi setelah terdampak oleh Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1997-1999 (Maruti, 2019). Kebijakan pemerintah Indonesia dan bank sentral adalah melakukan restrukturisasi perbankan dengan melakukan likuidasi dan merger terhadap bank-bank yang dinilai memiliki indikator keuangan yang tidak sehat. Untuk dapat memperkuat nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, pemerintah Indonesia menaikkan nilai suku bunga, kebijakan yang di lakukan oleh bank sentral tersebut berhasil menguatkan nilai mata tukar Rupiah menjadi Rp. 6500 pada tahun 1999.

Dalam publikasi jurnal yang dituluis oleh Hikmanto Juwana (Juwana, 2005, hal. 73-89). Beberapa Presiden Indonesia bertutut mempunyai beberapa fokus

kebijakan dalam melakukan proses reformasi yang sudah dimulai pada era B.J. Habibie, reformasi yang dilakukan mencakup berbagai aspek politik, ekonomi dan sosial Indonesia. Pasca diselenggarakan Pemilihan Umum demokratis pertama pada tahun 1999 Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia, era kepemimpinannya memberikan perhatian khusus terhadap isu sosial politik di Indonesia, selama masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid berbagai wilayah Indonesia dilanda oleh konflik sektarian yang mengakibatkan perlambatan pemulihan ekonomi. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi isu ekonomi, politik dan sosial yang semakin menjadi urgensi membuat parlemen untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri.

Pada tahun 2001 Indonesia diberikan peringatan oleh World Bank bahwa Indonesia terancam menjadi negara bangkrut. Untuk mengatasi situasi darurat tersebut Pemerintah Indonesia melakukan penjualan kepemilikan Indosat yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar milik nasional (Flynn, 2013, hal. 38). Setelah dilakukannya kebijakan tersebut indikator finansial Indonesia mulai mengalami pemulihan yang berlanjut hingga masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama masa kepemimpinannya, Indonesia kembali mengalami pertumbuhan ekonomi dan kenaikan taraf hidup yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membangkitkan sektor ekonomi mikro dan UMKM , sekaligus untuk memajukan perekonomian daerah (Steelyana, 2012, hal. 8-14).

Indonesia membangkitkan kembali diplomasi budaya melalui batik sebagai salah satu tonggak utama budaya nusantara dan terkhusus Indonesia, batik di akui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia pada pertemuan UNESCO di

Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009, pengakuan dari UNESCO tersebut turut mendorong perkembangan pesat industri pembuatan batik di Indonesia, sebagai bentuk ekspresi dari perasaan bangga masyarakat Indonesia atas pengakuan yang diberikan tersebut (Riptiana, 2017, hal. 53-56).

Evi Steelyana (Steelyana, 2012, hal. 8-14). menerangkan bahwa dampak terjadinya perkembangan pesat industri batik tersebut, muncul upaya dari investor maupun dari pelaku usaha perbankan untuk memberikan insentif bantuan keuangan kepada industri UMKM batik yang sudah ada agar dapat berkembang lebih pesat dan mampu melakukan ekspansi pasar dengan bantuan keuangan yang diberikan oleh para investor.

Ia kemudian menambahkan bahwa perkembangan industri batik secara pesat tersebut diberi sokongan dana dari bank dalam rangka perkembangan dan ekspansi pasar batik baik secara domestik dan internasional, bank-bank tersebut memberikan beberapa insentif dan kemudahan seperti fasilitas kemudahan kredit usaha kecil, pengubahan sistem menjadi *online banking* untuk mempermudah transaksi dan membuat sistem perdagangan batik menjadi lebih efisien, dan kemudahan memperoleh kredit bank bagi perintis usaha dan pemilik usaha batik kecil agar mampu melakukan ekspansi usaha batik dan memiliki pertumbuhan yang cepat (Steelyana, 2012, hal. 12-14).

Adanya insentif dan euforia dari masyarakat Indonesia atas pengakuan UNESCO turut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang disokong dari sektor budaya, hal ini menunjukkan adanya diversifikasi perekonomian Indonesia dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode pemerintahan dari 2004-2009 dan 2009-2014.

Diplomasi batik yang dilakukan oleh Indonesia merupakan cerminan identitas yang menjadi cerminan diri dalam lingkup kecil sekelompok masyarakat dan jati diri bangsa dalam lingkup luas. Identitas dalam arti jati diri bangsa, yang dapat dimengerti "suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas." Kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam salah satu negaranya adalah Indonesia yang memiliki pakaian tradisional. Setiap daerah memiliki pakaian khas tradisonalnya masing-masing, tidak hanya itu di setiap daerah juga memiliki filofosi di daerah tersebut. Di Indonesia, batik memiliki sejarah yang panjang. Di setiap wilayah di nusantara memiliki beranekaragam perkembangan kisah yang berbeda dan menarik tentang batik. Batik secara historis ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar abad akhir XVIII (Perkembangan Batik di Indonesia, 2012), awalnya ditulis dan dilukis di atas daun lontar. Sejarah batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik di Indonesia banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Majapahit dan terus berkembang ke kerajaan-kerajaan berikutnya, kemudian pada masa kerjaan Solo dan Yogyakarta. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak dahulu. Kesenian batik di indonesia adalah kesenian menggambar di atas kain untuk bahan pakaian yang meia njadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja di Indonesia zaman dulu. Awalnya batik di indonesia dikerjakan hanya terbatas orang-orang dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. (Prasetyo, Anindito, 2010)

Salah satu pakaian tradisonal Indonesia adalah kain batik. Kain batik ini memiliki banyak sekali motif, dan memiliki makna yang berbeda-beda. Misalnya motif batik Mega Mendung dari daerah Cirebon, yang memiliki makna kehidupan manusia sebagai sifat yang sabar, tidak mudah marah. Tidak hanya dijadikan sebagai bahan pakaian saja tetapi, kain

batik juga di gunakan sebagai lukisan, bahan tekstil dan aksesoris seperti tas, anting, gelang dan kalung.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, yang dimana Indonesia mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian, maka dari itu presiden Bambang Yudhoyono melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Berbagai permasalahan ini berujung pada suatu pertanyaan, yakni: **Mengapa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan batik sebagai *soft power diplomacy* untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan batik sebagai diplomasi yang lembut selama masa jabatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan batik sebagai identitas negara Indonesia melalui *soft diplomacy*. Secara teoritis, penelitian ini termasuk dalam kajian politik komparatif dan diharapkan dapat membawa pemikiran dan konsep bagi perkembangan ilmu politik luar negeri. Bahkan, penelitian ini diharapkan dapat melibatkan orang-orang yang tertarik dengan politik luar negeri dalam diplomasi budaya Indonesia. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan menghasilkan karya tulis sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana meningkatkan perekonomian Indonesia setelah melakukan *soft diplomacy* pada hubungan bilateral antara Amerika Serikat, Indonesia dan Amerika Serikat.

1. Penelitian ini merupakan bagian dari program sarjana di bidang ilmu politik. Dengan orang-orang yang diharapkan mampu memberikan ide sebuah konsep dalam pengembangan wawasan kebijakan luar negeri.
2. Penelitian ini tertarik dengan kebijakan luar negeri yang dapat anda ikuti diplomasi budaya Indonesia.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar membuat karya tulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai peran Diplomasi Indonesia-Amerika Serikat melalui kain batik yang membuat perekonomian Indonesia kembali membaik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bahwa sesungguhnya Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi bahkan sampai warga asing dilarang berkunjung oleh pemerintahan untuk datang ke Indonesia. Lalu bagaimana cara pemerintahan Indonesia menangani masalah tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa kain batik batik bisa menjadi salah satu alat untuk berdiplomasi ke Amerika Serikat
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian bahwa permasalahan ekonomi di Indonesia sempat menurun karena adanya terorisme yang terjadi di Indonesia. Lalu masalah ini bisa di selesaikan dengan adanya diplomasi dengan Amerika Serikat.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu hal fundamental khususnya untuk para pendidik dalam perguruan tinggi dan mahasiswa. Ada tiga alasan penting mengenai suatu penelitian, yaitu menambah dan memperoleh wawasan baru melalui data-data yang didapatkan, meningkatkan kinerja analisa data, penemuan sebuah ide dan suatu pemikiran yang baru, evaluasi kerja serta memeberikan suatu pengetahuan bagi masyarakat dari hasil suatu penelitian (Rico, 2010). Penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode untuk mendeskripsikan dan memahami pada pengamatan terhadap fenomena dan mempertimbangkan sifat makna dari fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada proses dan implikasi dari hasil. Perhatian penelitian kualitatif lebih terfokus pada faktor manusia, objek dan kelembagaan, serta hubungan atau interaksi antara faktor-faktor tersebut dengan tujuan untuk memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Metode kualitatif memandang penelitian sebagai suatu hal yang dinamis dan fleksibel, dimana penelitian ini mengetahui bahwa fenomena yang diteliti dapat berkembang dan berubah seiring dengan berjalannya waktu dan akan ada perubahan situasi atau keadaan yang kemungkinan akan terjadi kedepannya (Sugiyono, 2009). Pada tahap pengumpulan data pertama, peneliti akan mengumpulkan data sekunder dari situs resmi berupa literatur ilmiah, seperti artikel ilmiah dan jurnal yang dapat diakses melalui Internet, mengenai bentuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penyelesaian masalah hubungan bilateral menggunakan batik di Amerika Serikat sebagai diplomasi.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis dapat memberikan gambaran yang spesifik mengenai diplomasi Indonesia-Amerika Serikat melalui kain

batik di era Susilo Bambang Yudhoyono. Mulai dari pemaparan akan isu yang diteliti, pengolahan data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan, serta membuat sebuah kesimpulan atas pembahasan yang telah disusun secara sistematis agar permasalahan yang diteliti dapat dipahami (Sugiyono, 2007). Untuk dapat melakukan deskripsi tersebut, maka setiap data yang berkaitan dengan isu yang diteliti harus dipilah kembali sesuai dengan kategori dan kebutuhan penelitian, data-data tersebut kemudian dianalisa kembali agar mendapatkan deskripsi atau gambaran yang akurat sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan akan permasalahan dalam penelitiannya.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian terdapat dua jenis data. Pertama adalah data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain, baik itu untuk tujuan umum atau resmi seperti sebuah penelitian. Data yang terakhir adalah data tersier. Data ini merupakan data yang didapat dari data sekunder seperti jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian seseorang. Dalam tahap pertama pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data-data sekunder yang berasal dari situs-situs resmi, seperti situs pemerintahan ataupun suatu organisasi baik pemerintah ataupun non-pemerintah. Berikutnya peneliti akan mengumpulkan data-data tersier berupa literatur ilmiah seperti karya tulis dan jurnal-jurnal ilmiah yang didapat melalui media internet terkait bentuk diplomasi Indonesia – Amerika Serikat melalui kain batik di Era Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014.

Tabel 1.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek Data
Sekunder	Review Literatur	Menganalisa data-data yang penelitian sebelumnya, dokumen negara, ataupun buku dan artikel media yang berkaitan dengan penelitian ini.	Data terkait implementasi, dan hasil diplomasi Indonesia-Amerika Serikat melalui kain batik.
Tersier	Dokumentasi	Mengambil data-data grafik yang dikutip oleh penelitian sebelumnya, buku, dan artikel media yang berkaitan dengan penelitian ini.	Data grafik terkait peningkatan pariwisata ke Indonesia.

Sumber: diolah penulis

1.5.3 Teknik Validasi Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti harus dipastikan kebenaran atau keakuratannya, sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian informasi. Maka dari itu, peneliti harus menemukan teknik yang tepat dalam melakukan penelitian. Terdapat beberapa teknik validasi data yang dapat digunakan untuk menemukan atau menentukan apakah suatu data sudah termasuk valid atau tidak (Sugiyono, 2007).

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007). Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara

menganalisa kebenarannya yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menguraikan tentang Batik, yang hanya pakai oleh raja-raja pada jaman dahulu. Kemudian terjadinya pengemboman Bali, hingga membuat Indonesia dicap “travel warning” Kemudian terdapat tujuan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, metode penelitian kualitatif yang digunakan peneliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang diplomasi Batik di Amerika Serikat. Bab ini menguraikan tentang penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan topik yang sedang dikaji; kerangka konseptual yang digunakan dalam menjawab permasalahan, dan dugaan sementara atas jawaban permasalahan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ketiga adalah pembahasan dari topik penelitian yang di angkat, dalam hal ini membahas Diplomasi Indonesia-Amerika Serikat Melalui Kain Batik di Era

Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014. Bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan beberapa sub-bab yang menjadi bagian dari Diplomasi Indonesia-Amerika Serikat; Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia ke Amerika Serikat dan kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat, Diplomasi Batik Indonesia ke Amerika Serikat, mengenai seluruh temuan penelitian mengenai Batik sebagai bentuk diplomasi Indonesia di Amerika Serikat. Selain itu, menjelaskan mengenai kemitraan strategis, aspek-aspek yang terjalin, membuat perekonomian Indonesia kembali membaik dan pencapaian kepentingan Indonesia. Ini mencakup semua informasi yang diperoleh sesuai dengan konsep yang digunakan menjawab pertanyaan penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait hasil penelitian. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran berisi rekomendasi akan hasil peneliti